

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Pustaka Buku

Abdul Kadir, Muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Aripin, Jaelani, *Peradilan*, 2008, *Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, Jakarta: PT Dian Rakyat

Asnawi, M.Natsir 2012, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

Atho Mudzhar, Mohammad, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS

Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholis, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM

Dahwal, Sirman, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Eoh, O.S, 1996, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Gautama, Sudargo *Hukum Antar Golongan*, 1980, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve

- Hadikusuma , Hilman. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Hanitjo, Romi, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M.Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Jakarta: Sinar Grafika
- Imam, Soebekti, Wienarsih Dan Sri Soesilawati Mahdi, 2001, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Ngitama Jaya
- Jaya , Yanto, 2011, *Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya menurut Pandangan Hindu*, Jakarta: Komnas HAM
- Kountur, Ronny, 2004, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Thesis*, Jakarta: PPM
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- MK, Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mubarok, Jaih, 2005, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

- R. Tama dan Rusli, 1986, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*,
Bandung : CV Pionir Jaya,
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, 2010, *Cet.18*, Jakarta: Pradnya Paramita
- S. Tanuwibowo, Budi, 2011, *Konsepsi Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Menurut Pandangan Khonghucu*, Jakarta: Komnas HAM
- Sahrani Sohari dan Tihami, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sing, Ko Tjay, 1981, *Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga*, Semarang: Iktikad Baik
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum cet 3*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty
- Soetrisno Hadi, Metodologi Research, 1980, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2002, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta Bandung
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE

Syahrani , H.Riduan dan Abdurrahman,1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni

Triwulan, Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana

Usman , Sution, 1989,*Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty

A. Sumber Pustaka Peraturan

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang – Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- h. Kompilasi Hukum Islam

- i. Keputusan Presiden No 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil
- j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 8933/1558/PUOD tanggal 17 April 1989 tentang Tindak Lanjut Job Training Catatan Sipil
- k. Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran No.42/Pdt.P/ 2014/PN.Unr dan No.08/Pdt.P/2013/PN.Ung

B. Sumber Pustaka Jurnal dan Karya Ilmiah

Ari Gayo, Ahya, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya menurut Pandangan Budha*, Jakarta: Komnas HAM

Binawan, Al. Andang, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya menurut Pandangan Katolik*, Jakarta: Komnas HAM

Eky, Novina Dianti, 2014, *Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Solo: Universitas Negeri Surakarta

Fanny Fadlina , 2010, *Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama*, Solo : Universitas Sebelas Maret

Ma'rifatullah, Muhammad, 2017, *Harmonisasi Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim

Yuliasih, Rizki Ratna, 2015, *Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Mengenai Ijin Perkawinan Beda Agama*, Semarang: Universitas Diponegoro

B. Sumber Pustaka Internet

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-4077-lampiran.pdf>
(diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 12.25 WIB)

<https://rikadwisetiawati.wordpress.com/2013/11/13/hukum-perdata-penggolongan-penduduk-2/>(diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 13.46 WIB)

Irfan Catur Wibowo, *Catatan Sipil Penduduk*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/121140631/CATATAN-SIPIL-PENDUDUK>, Tanggal 20 Desember 2017, pukul 17.08

C. Sumber Pustaka Wawancara

Priyanto, Wasis, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Ungaran: 19 Desember 2017

Yuristiawan, Hendra, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran: Ungaran: 19 Desember 2017